

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu unsur terkecil dari sebuah Negara, dalam peranannya mempunyai unsur penting dalam upaya pembangunan secara nasional. Oleh karena itu, desa juga dianggap sangat strategis dalam pengidentifikasian suatu masalah yang ada di masyarakat sehingga perencanaan yang telah dibuat dapat terlaksana dari tingkat desa demi upaya penciptaan stabilitas nasional. Sudah diatur dalam Undang – Undang Desa (UU No. 6 tahun 2014) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia (Anggraeni, 2016). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga perekonomian dengan modal yang dibangun oleh inisiatif masyarakat desa. Pemenuhan dalam modal usaha BUMDes harus dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak BUMDes dapat mengajukan untuk pinjaman modal dari luar pihak, seperti dari pemerintah desa atau pihak lainnya.

Sejalan perkembangan dalam perekonomian khususnya di Negara Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar penyusunan dalam laporan keuangan. Standar penyusunan laporan keuangan tersebut berupa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam penyusunan dan penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan benar pada BUMDes adalah penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada (SAK ETAP) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas.

Dalam penyusunan keuangan dengan SAK ETAP masih banyak BUMDes yang belum menerapkan SAK ETAP karena berbagai macam anggapan dalam pengelolaannya merupakan hal yang sederhana dan mudah. Namun, pada kenyataannya dalam penyusunan keuangan BUMDes masih belum ada yang menetapkan sebagai acuan kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas. Terdapat beberapa paparan yang dikemukakan, yaitu : Pendapat dari Rudini dan Nurhayati (2011) Sekian banyak BUMDes di Indonesia masih belum terimplementasikan oleh beberapa desa yang menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan memang tidak adanya ketentuan yang pasti dalam penetapan standar keuangan yang harus digunakan untuk suatu BUMDes. Menurut Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara agar terdorongnya pembangunan yang ada di tingkat desa, adalah dengan pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa

melalui lembaga-lembaga ekonomi pada tingkat desa. Dengan adanya program-program BUMDes, dapat menarik minat masyarakat dalam usaha. Terbentuknya BUMDes bertujuan untuk penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa.

Tujuan dari Pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep pemberdayaan masyarakat pada umumnya, dengan keberadaan BUMDes diharapkan dapat memberikan dukungan demokrasi sosial di desa melalui program-program yang diberikan. Di satu sisi, pemerintah desa dapat berpola pikir kreatif dan inovatif dalam berkolaborasi kegiatan ekonomi dalam desa dengan tujuan membangun perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru (Pakaya et al., 2019)

Dalam pengelolaan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember, pihak pengelola memiliki kewajiban dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak hanya berupa laporan pelaksanaan kegiatan saja, namun mencakup juga laporan anggaran keuangan. Terdapat kendala dalam pihak pengelola BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember pada sumber daya manusia, dampak yang dialami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Hanya sekedar omset, rugi maupun laba berapa serta analisa pengembangan usaha kedepannya dari data laporan yang dimiliki oleh BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember. Dengan adanya hal ini, seharusnya pihak pengelolaan pelaporan keuangan BUMDes dapat digunakan dengan keuangan berdasarkan acuan pada SAK ETAP (Probowulan et al., 2021)

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang termasuk pada bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sejak tahun 1941. Kabupaten Jember sekarang memiliki luas wilayah 3.092,34 km² terdiri dari 31 kecamatan 226 desa, jumlah penduduk mencapai 2.622.421 jiwa. Kabupaten Jember juga termasuk memberikan program-program pada BUMDes yang berkembang secara pesat (Sumiasih, 2018). Menurut Suyanto selaku direktur BUMDes, salah satu desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu desa Jambearum, BUMDesnya dinamakan “BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember” yang mengelola unit usaha pemberdayaan desa, simpan pinjam, pangan. Usaha pemberdayaan desa ini dikelola BUMDes Pesat berdiri tahun 2018. BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember dalam laporan keuangannya hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja, yang seharusnya BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember mencatat laporan keuangan secara detail. Pihak pengelola laporan belum sesuai dengan standar yang harus diterapkan pada pedoman SAK ETAP dan dalam penyampaian laporan pertanggungjawabannya belum sesuai PERDA yang berlaku.

Dari standar akuntansi disimpulkan bahwa BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai SAK ETAP. Diharapkan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, serta bisa memperoleh dana dari pihak eksternal bank

atau perusahaan untuk mengembangkan usaha. Dalam pengolaan keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember masih ada yang beranggapan bahwa pengolaan laporan keuangan itu mudah dan sederhana. Penyusunan laporan keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember belum mengacu pada SAK ETAP. Hal ini terbukti dari laporan keuangan hanya ada pengeluaran dan pemasukan saja.

BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember melakukan perhitungan masing-masing rasio, maka disajikan rangkuman informasi laporan keuangan yang berkaitan dengan rasio yang akan digunakan. Di lihat dari laporan keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember yaitu, seperti yang tampak pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Rangkuman Keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember

| No | Uraian | Periode | |
|----|---------------------------------|------------------|--------------------|
| | | Juli 2019 | Juli 2020 |
| 1 | Jumlah Peminjam | 75 orang | 208 orang |
| 2 | Nilai Pinjaman Akumulasi | Rp.70.045.000,00 | Rp. 289.262.700,00 |
| 3 | Jumlah Penabung | 100 orang | 344 orang |
| 4 | Nilai Tabungan Per Bulan | Rp.29.165.000,00 | Rp.141.273.600,00 |
| 6 | Pendapatan Kemitraan Peternakan | Rp.20.000.000,00 | Rp.15.000.000,00 |

Sumber: BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember, 2021.

Berdasarkan Rangkuman Informasi Keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember menunjukkan bahwa BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember mengalami penurunan pendapatan kemitraan peternakan pada bulan Juli 2020 sebesar Rp.15.000.000,00 lebih rendah bila dibandingkan pada bulan Juli 2019 yakni sebesar Rp.20.000.000,00. Penurunan pendapatan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember salah satunya disebabkan dengan asimetri informasi antara bagian keuangan dengan bagian pemasaran sehingga terjadi penurunan pendapatan. Mengingat pentingnya penilaian tingkat kesehatan BUMDes untuk menentukan kebijakan-kebijakan guna mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dalam menghadapi persaingan sesama jenis usaha.

Penyajian laporan keuangan menjadi salah satu hal mutlak yang harus dimiliki, jika BUMDes Arum Jaya Mandiri berkeinginan dalam mengembangkan usahanya. Penerapan SAK ETAP adalah salah satu solusi dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Arum Jaya Mandiri yang dapat memudahkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaporan laporan keuangan oleh BUMDes Arum Jaya Mandiri sering kali tidak tepat waktu tiap bulannya. Hal ini dibuktikan dari laporan tercatat oleh desa, dimana pelaporan atas laporan keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dievaluasi oleh BUMDes Arum Jaya Mandiri. Masalah utama penyebab keterlambatan pelaporan laporan

keuangan yaitu kurangnya kemampuan SDM dalam penyesuaian laporan keuangan sesuai ketentuan SAK ETAP.

Berdasarkan latar belakang di atas ada kekurangan yang terjadi pada BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember, dalam penyusunannya laporan keuangan masih terbilang sederhana berupa pemasukan dan pengeluaran, laporan tersebut belum sesuai SAK ETAP. Oleh karena itu, peneliti menarik kesimpulan untuk merenkontruksi penyusunan laporan keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri Kabupaten Jember sampai menghasilkan suatu laporan keuangan yang benar dan akurat berdasarkan pedoman SAK ETAP dan peraturan yang berlaku, karena itu peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Penerapan SAK ETAP pada BUMDes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik dari latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan SAK ETAP di pada BUMDes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SAK ETAP di pada BUMDes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran bagi BUMDes Arum Jaya Mandiri agar bisa menetapkan kebijakan dalam mengelola BUMDes Arum Jaya Mandiri dan dapat mengetahui kekurangan BUMDes Arum Jaya Mandiri supaya bisa mengevaluasi sistem pengelolaan BUMDes Arum Jaya Mandiri agar bisa berjalan secara efektif dan efisien.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis mendapatkan pengetahuan tentang pencatatan persediaan dan memberikan wawasan mengenai pentingnya pencatatan persediaan agar perusahaan bisa mencapai suatu tujuannya.

3. Bagi pembaca

Penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian dimasa datang dan menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan BUMDes yang baik.